

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693108/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03
Tanggal : 09 Maret 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
- 4. Kode/Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
- Sebesar : Rp. 1.268.438.000 (SATU MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.268.438.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 1.268.438.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

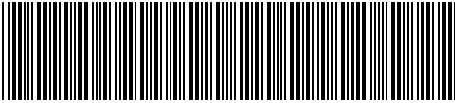
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026

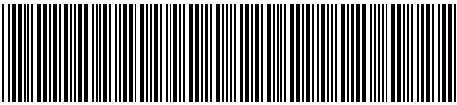


DS:0531-5105-0508-4307

Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	23.831.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	23.831.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.244.607.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.244.607.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
I A. INFORMASI KINERJA



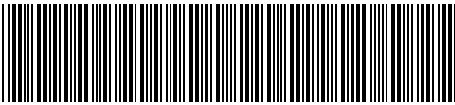
DS:0531-5105-0508-4307

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				23.831.000	
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				23.831.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	23.831.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	23.831.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				1.244.607.000	
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				1.244.607.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		8,00	Lembaga	26.859.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		8.00	Lembaga	26.859.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang	21.392.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300.00	Orang	21.392.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		20,00	Lembaga	49.729.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		20.00	Lembaga	49.729.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	9.022.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	Data	9.022.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0531-5105-0508-4307

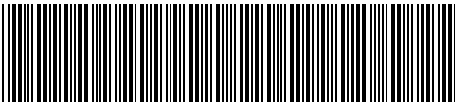
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		182,00	Orang	910.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	182.00	Orang	910.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		20,00	Kelompok Masyarakat	159.400.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	20.00	Kelompok Masyarakat	159.400.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	68.205.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1.00	Lembaga	68.205.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0531-5105-0508-4307

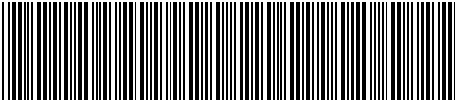
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.268.438.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.268.438.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

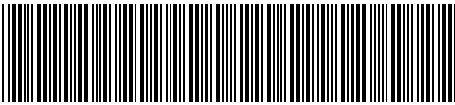


DS:0531-5105-0508-4307

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693108	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR	-	1.268.438	-	-	-	1.268.438	24 . 51 039	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	23.831	-	-	-	23.831		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	23.831	-	-	-	23.831		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	23.831	-	-	-	23.831		
01 RM		-	23.831	-	-	-	23.831		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.244.607	-	-	-	1.244.607		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.244.607	-	-	-	1.244.607		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	26.859	-	-	-	26.859		
01 RM		-	26.859	-	-	-	26.859		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	21.392	-	-	-	21.392		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

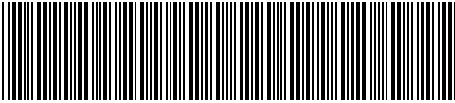


DS:0531-5105-0508-4307

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	21.392	-	-	-	21.392	039	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	49.729	-	-	-	49.729	24 . 51	
01 RM		-	49.729	-	-	-	49.729	039	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	9.022	-	-	-	9.022	24 . 51	
01 RM		-	9.022	-	-	-	9.022	039	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	910.000	-	-	-	910.000	24 . 51	
01 RM		-	910.000	-	-	-	910.000	039	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	159.400	-	-	-	159.400	24 . 51	
01 RM		-	159.400	-	-	-	159.400	039	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0531-5105-0508-4307

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

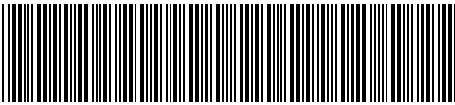
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	68.205	-	-	-	68.205	24 . 51	
	01 RM	-	68.205	-	-	-	68.205	039	
JUMLAH		-	1.268.438	-	-	-	1.268.438		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0531-5105-0508-4307

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693108) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

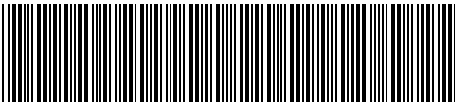
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693108	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	94.860	108.270	131.922	124.181	159.194	133.581	140.943	86.942	20.629	53.236	214.680	1.268.438
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	94.860	108.270	131.922	124.181	159.194	133.581	140.943	86.942	20.629	53.236	214.680	1.268.438
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	1.260	3.050	2.050	4.156	3.675	2.300	3.050	750	3.540	0	0	23.831
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	1.260	3.050	2.050	4.156	3.675	2.300	3.050	750	3.540	0	0	23.831
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		0	93.600	105.220	129.872	120.025	155.519	131.281	137.893	86.192	17.089	53.236	214.680	1.244.607	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	93.600	105.220	129.872	120.025	155.519	131.281	137.893	86.192	17.089	53.236	214.680	1.244.607

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
IV A. B L O K I R



DS:0531-5105-0508-4307

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693108] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

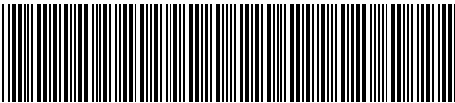
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693108/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0531-5105-0508-4307

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693108] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001